

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Transformasi Struktural memberikan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal tersebut terjadi karena peningkatan proporsi tenaga kerja formal di Pulau Sumatera masih belum mampu menekan ketimpangan secara kuat, akibat dominasi sektor primer dengan produktivitas rendah dan tingginya informalitas yang memperlambat migrasi sektor. Secara umum, meskipun transformasi struktural memiliki potensi untuk mendistribusikan pendapatan lebih merata melalui pergeseran ke sektor modern, jika tidak disertai dengan kebijakan pendukung seperti pelatihan vokasi, infrastruktur, dan insentif migrasi, hal ini dapat memberikan dampak terbatas terhadap penurunan ketimpangan di Pulau Sumatera.
2. Rata-rata Lama Sekolah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal tersebut terjadi karena peningkatan akses pendidikan yang lebih lama mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas kelompok berpendapatan rendah lebih cepat daripada kelompok tinggi, sehingga meratakan distribusi upah dan pendapatan.
3. Belanja Pemerintah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal tersebut terjadi karena peningkatan alokasi belanja publik, terutama pada infrastruktur dan layanan sosial, berfungsi sebagai stimulan permintaan agregat yang menciptakan lapangan kerja inklusif dan koreksi kegagalan pasar.
4. Transformasi Struktural, Rata-rata Lama Sekolah, dan Belanja Pemerintah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal tersebut terjadi karena interaksi ketiga faktor tersebut menciptakan sinergi kompleks dalam mengoreksi ketidakseimbangan ekonomi, di mana pergeseran struktur tanpa dukungan pendidikan dan fiskal justru dapat memperlebar kesenjangan. Secara umum, meskipun ketiga variabel memiliki

potensi untuk pemerataan pendapatan melalui pendekatan terintegrasi, jika tidak disertai dengan kebijakan yang sinkron dan inklusif, hal ini dapat memberikan dampak terbatas terhadap pengurangan ketimpangan secara keseluruhan.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti ajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saran Teoritis

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperkaya kerangka teoritis dengan mengintegrasikan pendekatan yang lebih menekankan pada mekanisme pemerataan jangka panjang, peran institusi dalam memperkuat efek human capital, serta dinamika redistribusi melalui kebijakan fiskal daerah. Pengembangan ini diperlukan agar analisis tidak hanya berhenti pada hubungan langsung, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa pendidikan dan belanja publik dapat memberikan dampak penurunan ketimpangan yang kuat dan konsisten di wilayah berkembang seperti Pulau Sumatera.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menggunakan data tingkat kabupaten/kota di Pulau Sumatera agar dapat menerapkan analisis spasial seperti Moran's I karena data per provinsi cenderung mengabaikan variasi lokal yang signifikan akibat agregasi wilayah luas. Hal tersebut terjadi karena ketimpangan pendapatan sering bersifat spasial, dipengaruhi oleh faktor seperti distribusi aset dan migrasi intra-kabupaten. Secara umum, meskipun data provinsi memberikan overview makro, jika tidak disertai dengan analisis spasial, hal ini dapat memberikan dampak terbatas terhadap rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

5.2.2. Saran Praktis

1. Pemerintah daerah di provinsi dengan RLS tertinggal seperti Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung disarankan memperluas akses pendidikan vokasi berbasis teknologi digital, seperti kursus daring tentang pertanian dan pengolahan hasil bumi, yang terintegrasi dengan beasiswa khusus siswa pedesaan. Pendekatan ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara masif di wilayah agraris, sehingga dapat mempercepat peningkatan RLS dan

mengurangi ketimpangan pendapatan melalui keterampilan yang lebih relevan dengan ekonomi lokal.

2. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan disarankan memperkuat mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dengan bobot lebih besar untuk provinsi Sumatera dengan ruang fiskal terbatas seperti Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, agar alokasi belanja redistributif seperti pendidikan dan kesehatan menjadi lebih merata antarprovinsi. Pendekatan ini belum sepenuhnya terealisasi meskipun DBH telah diterapkan di Sumatera Utara, sehingga dapat mengurangi disparitas belanja dan mendukung penurunan ketimpangan pendapatan secara regional.